

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa terus bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu dan kami bersyukur pula bahwa dengan bimbingan-Nya, kami berhasil menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Rencana 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai acuan atau panduan kerja selama satu tahun.

Rencana Kerja Bappedalitbang ini berisikan penjabaran program serta kegiatan pembangunan yang memasuki tahun kedua dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Program dan kegiatan yang disusun pada Rencana Kerja Perubahan Bappedalitbang Tahun 2022 ini dibuat merujuk pada pencapaian kinerja sebagaimana uraian tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang sebagai SKPD.

Diharapkan bahwa Bappedalitbang sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten yang terdepan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, sangat disadari bahwa dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan dalam mencapai harapan dan kemajuan kearah yang lebih baik.

Demikian dokumen ini disampaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak

Batulicin, Juli 2022
Kepala Bappeda,

Andi Anwar Sadat, S.Pi

Pembina

NIP. 19711128 200604 1 018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	01
Daftar Isi.....	03
Daftar Tabel	xx
Bab I Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja.....	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappedalitbang	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan	32
2.4. Review terhadap Rancangan perubahan Bappedalitbang.....	34
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	56
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD.....	62
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang.....	74
3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja SKPD.....	76
Bab IV Penutup.....	97

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 memuat perubahan dan pergeseran anggaran antar sub kegiatan, hal ini diakibatkan adanya perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan

hasil-hasil yang harus dicapai, proyeksi belnaja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat, pembayaran hutang tahun 2021, dan permasalahan-permasalahan aktual yang berkembang.

Pada Pasal 360 ayat (3) bahwa penyusunan rancangan perubahan rencana kerja berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanahumbu mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi kepala daerah dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
2. Perubahan Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan dan sub kegiatan kedalam KUA, PPAS serta perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA)
3. Perubahan Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam perubahan Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

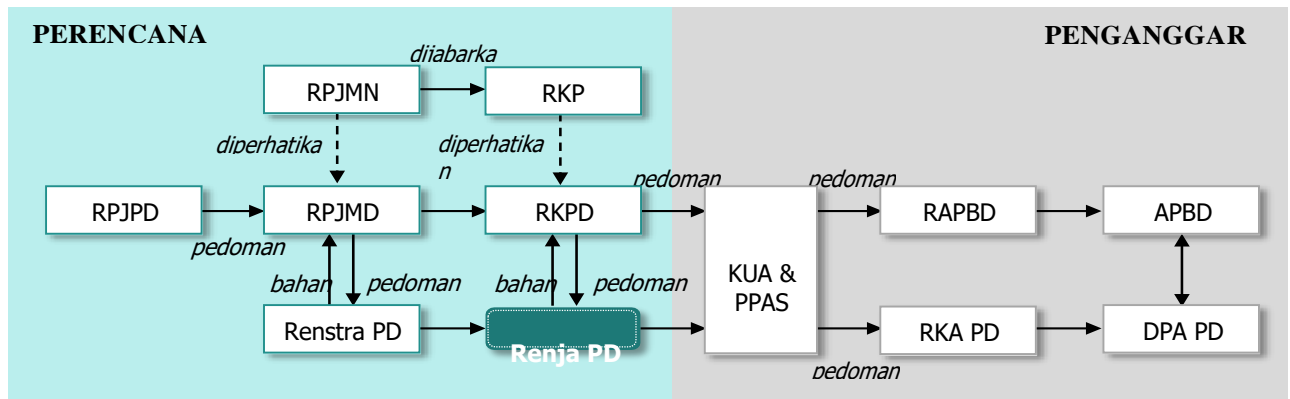
Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Tanahumbu Tahun 2022 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan triwulan II dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
3. Perubahan Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam P-KUA dan P-PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Perubahan rancangan RKPD.” Perubahan Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam

penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Selanjutnya Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2019
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
17. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan BAPPEDALITBANG Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappedalitbang tahun 2022
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan BAPPEDA yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Pengertian Renja, Proses Penyusun Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kab/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Perubahan BAPPEDA Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan BAPPEDA.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan BAPPEDA, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Bappeda pada Triwulan II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan BAPPEDA Tahun 2021 Pada triwulan II dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan BAPPEDA

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD

3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja SKPD

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022 PADA TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDALITBANG Tahun 2022 Pada Triwulan II dan Capaian Renstra BAPPEDA 2021-2026

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan BAPPEDALITBANG selaku SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Salah satu indikator kinerja daerah terkait dengan urusan perencanaan pembangunan yaitu Ketersediaan dokumen perencanaan, dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2021 telah selesai ditetapkan baik dengan Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Kepala SKPD sesuai mekanisme dan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022 BAPPEDALITBANG telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adapun Dokumen perencanaan yang sudah diselesaikan sampai dengan bulan Januari tahun anggaran 2022 adalah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006 -2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
- d. Renja BAPPEDALITBANG Tahun 2022
- e. Renstra BAPPEDA Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu ditunjang dengan Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- A. Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.393.274.110,-
- B. Belanja Barang Barang Jasa sebesar Rp. 7.039.228.476,-
- C. Belanja Modal sebesar Rp. 719.880.000,-

A. Evaluasi Capaian Kinerja Bappedalitbang terhadap Renstra dan Renja

Evaluasi capaian berdasarkan indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappedalitbang memiliki 4 Program, 16 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan dimana masing masing memiliki target dan indikator.

Adapun capaian renstra pada table berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Tanah Bumbu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9 = 5 + 7	10=9/4 x100%
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01				PERENCANAAN								
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	85.00	0.00	82	0	0.00%	81.00	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)	60.00	0.00	12	6	50.00%	6.00	10.00%

						*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0.00	0.00	1053	585	55.56%	585.00	0.00%
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Bulan)	60.00	0.00	12	6	50.00%	6.00	10.00%
						*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia (stell)	325.00	0.00	65	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	0.00	65	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	75.00	0.00	30	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0.00	0.00	30	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (buah)	250.00	0.00	50	50	100.00%	50.00	20.00%
						*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	50	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	100.00	0.00	20	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	20	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (bulan)	100.00	0.00	12	6	50.00%	6.00	6.00%
						*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	12	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	250000.00	0.00	12	6	50.00%	6.00	0.00%

						*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	12	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Media/Buku/Eksemplar)	50.00	0.00	24	12	50.00%	12.00	24.00%
						*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0.00	0.00	24	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	1055.00	0.00	12	6	50.00%	6.00	0.57%
						*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun*) (unit)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (bulan)	60.00	0.00	12	6	50.00%	6.00	10.00%
						*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	0.00	12	6	50.00%	6.00	0.00%
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	0.00	0.00	25	0	0.00%	0.00	0.00%

						*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0.00	0.00	25	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	10.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	5.00	0.00	12	6	50.00%	6.00	120.00%
						*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	12	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	150.00	0.00	25	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	25	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu (%)	100.00	0.00	100	0	0.00%	100.00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)	4.00	0.00	1	1	100.00%	1.00	25.00%
						*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	0.00	0.00	1	1	100.00%	1.00	0.00%
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi publik (Dokumen)	7.00	0.00	1	1	100.00%	1.00	14.29%
						*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	0.00	0.00	1	1	100.00%	1.00	0.00%

5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	umlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun (Dokumen)	58.00	0.00	12	12	100.00%	12.00	20.69%
						*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	0.00	0.00	12	12	100.00%	12.00	0.00%
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Masukan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen laporan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%

5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Publikasi Profil Pembangunan Daerah (Dokumen/Publikasi)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan (Kali)	20.00	0.00	4	2	50.00%	2.00	10.00%
						*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	0.00	0.00	120	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100.00	0.00	100	0	0.00%	100.00	
						Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA) (%)	100.00	0.00	100	0	0.00%	100.00	
						Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)	100.00	0.00	100	0	0.00%	100.00	
5	01	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
5	01	3	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%

5	01	3	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	4.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	8.00	0.00	2	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	0.00	0.00	2	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%

5	01	3	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	12.00	0.00	2	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0.00	0.00	2	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								
5	01	3	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%

						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%

5	01	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah								
5	01	3	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur. (Laporan)	10.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%

						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	01	3	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan. (Laporan)	5.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan daerah (%)	100.00	0.00	100	0	0.00%	100.00	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian Bidang Pemerintahan Umum yang Disusun/Dikerjakan (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	3.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%

						*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	05	02	2.01	03	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Penelitian Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Disusun/Dikerjakan (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	2.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	05	02	2.01	10	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan (Dokumen/Publikasi)	4.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang Disusun. (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	4.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup yang Disusun. (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	2.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%

5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, pengembangan dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang Disusun/Dikerjakan. (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	4.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%
						*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0.00	0.00	1	0	0.00%	0.00	0.00%

Bappedalitbang memiliki 4 Program dimana capaian masing masing program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian sebesar 41,81%
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan capaian sebesar 42,19%
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian sebesar 23,53%
4. Program Penelitian dan pengembangan dengan capaian sebesar 2,53%

B. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu murni Bappedalitbang kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran murni Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 tersaji pada table berikut.

Dari table 2.1 di atas ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target pada triwulan II tahun 2022, yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Terdapat jabatan structural dan fungsional yang masih kosong
Pemecahan Masalah : Segera mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan peraturan yang ada
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Terdapat beberapa kesalahan dalam kode rekening belanja
Pemecahan Masalah : akan dilakukan perbaikan kode rekening pada anggaran perubahan
- c. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Dilakukannya efisiensi anggaran
Pemecahan Masalah : Akan disesuaikan pada anggaran perubahan

- d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Dilakukannya efisiensi anggaran
Pemecahan Masalah : Akan di hapus pada perubahan anggaran
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Menyesuaikan dengan kebutuhan
Pemecahan Masalah : akan segera dilaksanakan pada perubahan anggaran
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dilakukannya efisiensi anggaran, ada beberapa belanja yang dihapus
Pemecahan Masalah : akan segera dilaksanakan pada perubahan anggaran
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Menyesuaikan dengan kebutuhan
Pemecahan Masalah : akan segera dilaksanakan pada perubahan anggaran
- h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dilakukannya efisiensi anggaran
Pemecahan Masalah : Akan di hapus pada perubahan anggaran
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Menyesuaikan dengan kebutuhan
Pemecahan Masalah : akan segera dilaksanakan pada perubahan anggaran
- k. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Menyesuaikan dengan kebutuhan

Pemecahan Masalah : akan segera dilaksanakan pada perubahan anggaran

1. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Dilakukannya efisiensi anggaran dengan mengurangi beberapa item belanja
Pemecahan Masalah : beberapa belanja akan dihapus/dikurangi jumlahnya pada perubahan anggaran
- m. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Secara fisik sub kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas namun proses pencairan belum terlaksana
Pemecahan Masalah : akan segera berkoordinasi dengan satuan bendahara dan bagian keuangan di BPKAD
- n. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Menyesuaikan dengan kebutuhan
Pemecahan Masalah : akan segera dilaksanakan pada perubahan anggaran
- o. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
Menyesuaikan dengan kebutuhan
Pemecahan Masalah : akan segera dilaksanakan pada perubahan anggaran
- p. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Menyesuaikan dengan kebutuhan
Pemecahan Masalah : akan segera dilaksanakan pada perubahan anggaran
- q. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Menyesuaikan dengan kebutuhan
Pemecahan Masalah : akan segera dilaksanakan pada perubahan anggaran

- r. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Secara fisik kegiatan ini sudah dilaksanakan walaupun tidak sesuai dengan anggaran kas karena dilakukannya efisiensi anggaran namun proses pencairan belum terlaksana
Pemecahan Masalah : akan segera berkoordinasi dengan satuan bendahara dan bagian keuangan di BPKAD dan akan mengurangi/ menghapus beberapa item belanja pada perubahan anggaran
- s. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Secara fisik kegiatan ini sudah dilaksanakan walaupun tidak sesuai dengan anggaran kas karena dilakukannya efisiensi anggaran namun proses pencairan belum terlaksana
Pemecahan Masalah : akan segera berkoordinasi dengan satuan bendahara dan bagian keuangan di BPKAD dan akan mengurangi/menghapus beberapa item belanja pada perubahan anggaran
- t. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Secara fisik kegiatan ini sudah dilaksanakan walaupun tidak sesuai dengan anggaran kas karena dilakukannya efisiensi anggaran namun proses pencairan belum terlaksana
Pemecahan Masalah : akan segera berkoordinasi dengan satuan bendahara dan bagian keuangan di BPKAD dan akan mengurangi/menghapus beberapa item belanja pada perubahan anggaran
- u. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
Kesalahan input nama Sub Kegiatan sehingga tidak bisa terlaksana

Pemecahan Masalah : nama sub kegiatan akan diperbaiki di perubahan anggaran

v. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Item belanja banyak di alihkan ke sub kegiatan lain, karena anggaran tidak mencukupi untuk dilaksanakan

Pemecahan Masalah :

w. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

Secara fisik sub kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas namun proses pencairan belum terlaksana

Pemecahan Masalah : akan segera berkoordinasi dengan satuan bendahara dan bagian keuangan di BPKAD

x. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Beberapa item belanja belum tercover pada anggaran murni

Pemecahan Masalah : akan di anggarkan pada anggaran perubahan

y. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Item belanja di alihkan ke sub kegiatan lain

Pemecahan Masalah : akan di sesuaikan pada perubahan anggaran

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Bappedalitbang yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu, maka ada 2 indikator kinerja pelayanan yang merupakan Indikator Kinerja Utama untuk Bappedalitbang, disamping juga ada beberapa indikator kinerja pelayanan yang muncul sebagai akibat dari tupoksi SKPD. IKU yang dimaksud adalah;

1. Persentase tingkat capaian sasaran pembangunan daerah
2. Persentase penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan

Sampai dengan tahun anggaran 2019 Bappeda telah menyusun berbagai dokumen perencanaan dan menyediakan data dan informasi sebagai bahan perencanaan untuk para pemangku kepentingan. Pada prosesnya memang harus berhadapan dengan hambatan atau permasalahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan atau hambatan dalam melaksanakan kinerja pelayanan Bappeda antara lain yaitu:

1. Koordinasi perencanaan pembangunan di daerah yang masih lemah sehingga perencanaan pembangunan nampak terkotak-kotak dan tidak menunjukkan sinergi yang baik.
2. Data dan informasi yang kurang berkualitas karena kurangnya kepedulian terhadap data.
3. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang masih belum optimal yang berkaitan dengan masih kurangnya kemampuan/kapasitas aparatur perencana dalam menganalisa data dan informasi yang menjadi bahan perencanaan pembangunan yang ada, sehingga perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur yang ada untuk memperbaiki kualitas SDM maupun kualitas dokumen perencanaan daerah.

Pelayanan Bappedalitbang atas tugasnya sebagai koordinator perencanaan pembangunan akan terus diupayakan agar menjadi lebih baik. Pada tahun 2022 ini Bappeda telah mengupayakan agar

pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan berjalan sesuai tahapan dan peraturan serta tepat waktu disamping mengupayakan juga peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan. Ini dapat disebut sebagai kemajuan, dan Bappedalitbang akan terus melakukan perbaikan yang terus menerus untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan mengukir prestasi perencanaan pembangunan di level provinsi dan nasional.

Melihat kondisi tersebut di atas Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
- e. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkeadilan.

Tabel 2.2
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan Bappedalitbang
Kabupaten Tanah Bumbu

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi dan Capaian Kinerja		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
			1. Urusan Perencanaan Pembangunan								
	Kepuasan SKPD terhadap pelayanan tuisi Bappeda (indeks)		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase usulan pemangku kepentingan/masyarakat/hasil musrenbang yang diakomodir di APBD/Perencanaan penganggaran (Persen)		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	30	30	30	30	30	30	30	
	Tingkat Keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan. (Persen)		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan (Persen)		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	2	2	3	2	2	3	3	
	Tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran. (Persen)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat capaian pembangunan sasaran daerah (Persen)		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100	100	100	
			2. Penelitian dan pengembangan								
	Persentase penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan.		Persentase implementasi rencana kelitbang	1	1	1	1	1	1	1	
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbang.	1	1	1	1	1	1	1	
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	1	1	1	1	1	1	1	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	1	1	1	1	1	1	1	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappedalitbang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Isu-isu penting yang mewarnai penyusunan Renja Tahun 2022 ini antara lain adalah:

- 1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid-19.
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- 3) Implementasi nilai-nilai spiritual dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sehari-hari menuju Tanah Bumbu sebagai Serambi madinah.

Selain isu-isu penting, juga terdapat hal-hal yang menjadi permasalahan atau penghambat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi diantaranya :

Faktor Eksternal :

- a. Hasil evaluasi belum dijadikan sebagai dasar di perencanaan tahun berikutnya.
- b. Kurangnya kepatuhan menyampaikan laporan tepat waktu

Faktor Internal :

- a. Keterbatasan kapasitas perencana/SDM di Bappeda
- b. Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai untuk pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

- c. Budaya kerja pegawai masih rendah, yang tergambar pada masih kurangnya disiplin dan lemahnya koordinasi internal.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di tahun 2023 mendatang, yaitu sebagai berikut :

Tantangan :

1. Kebutuhan data yang diperlukan Bappeda terhadap data yang diberikan oleh SKPD tidak konsisten.
2. Masih lemahnya fungsi pengendalian institusi perencanaan dalam proses penganggaran.
3. Hasil evaluasi belum dijadikan sebagai dasar di perencanaan tahun berikutnya.

Peluang :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Koordinasi yang baik dengan instansi vertikal dan perguruan tinggi untuk ketersediaan data dan perencanaan pengembangan sektoral.
3. Komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memantapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bappedalitbang serta meningkatkan kapasitas/pemahaman substansi perencanaan para aparatur perencanaan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pencapaian visi dan misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator dan targetnya. Bappedalitbang memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah coordinator perencanaan sesuai dengan visi dan misi Bupati. Karena itu Bappedalitbang perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

2. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappedalitbang.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan yang signifikan pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Bappeda. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel TC - 31. berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Ket
	Program/Kegiatan	Lo ka si	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lo ka si	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PERENCANAAN				10,907,372,128	PERENCANAAN				12,594,232,370	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	82	6,935,878,628	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	82	8,652,510,820	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,892,646,760	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,962,460,952	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)	12	3,976,443,460	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)	12	6,047,417,652	
			*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1053				*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1053		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Bulan)	12	916,203,300	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Bulan)	12	915,043,300	
			*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1				*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				61,406,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19,800,000	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia (stell)	65		19,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia (stell)	65		19,800,000	
			*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65					*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	30		41,906,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	30		-	
			*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30					*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,108,443,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah					929,629,200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (buah)	50		4,866,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (buah)	50		4,866,200	
			*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50					*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	20		199,645,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	20		74,645,000	
			*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20					*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (bulan)	12		103,895,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (bulan)	12		90,170,000	

			*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12				*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	12		19,180,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	12		19,180,000		
			*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12				*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Media/Buku/Eksemplar)	24		1,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Media/Buku/Eksemplar)	24		1,800,000		
			*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24				*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	12		779,057,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	12		738,968,000		
			*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1				*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					215,050,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun*) (unit)	1		215,050,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun*) (unit)	1		-		
			*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1				*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1				

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					281,142,668	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					316,180,668	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (bulan)	12		148,345,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (bulan)	12		148,345,000	
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1					*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		132,797,668	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		167,835,668	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					377,190,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					424,440,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	25		162,045,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	25		169,445,000	
			*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25					*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	1		118,350,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	1		184,950,000	
			*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1					*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1			

			(Unit)					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	12		20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	12		-	
			*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12				*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	25		76,795,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	25		70,045,000	
			*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25				*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25			
	PERENCANAAN						PERENCANAAN					
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu (%)	100		1,739,222,650	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu (%)	100		1,889,269,800	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					862,065,400	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				923,824,150	

	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)	1			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)	1				
			*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1		99,997,900		*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1			99,997,900	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi publik (Dokumen)	1			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi publik (Dokumen)	1				
			*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1		77,944,750		*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1			60,889,750	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD (Dokumen)	1			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD (Dokumen)	1				
			*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		37,731,250		*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1			-	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		umlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun (Dokumen)	1			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	umlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun (Dokumen)	1				
			*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1		93,778,700		*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1			82,498,700	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun (Dokumen)	12		48,479,250	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun (Dokumen)	12			18,029,250	

			*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	12				*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	12			
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah (Dokumen)	1		504,133,550	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah (Dokumen)	1		662,408,550	
			*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	1				*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	1			
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					305,932,750	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				299,641,150	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)	1		167,107,950	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)	1		175,107,950	
			*Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Masukan)	1				*Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Masukan)	1			
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah dokumen laporan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD (Dokumen)	1		23,974,600	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen laporan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD (Dokumen)	1		21,490,000	

			*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	1				*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	1			
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Publikasi Profil Pembangunan Daerah (Dokumen/Publikasi)	1		114,850,200	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Publikasi Profil Pembangunan Daerah (Dokumen/Publikasi)	1		103,043,200	
			*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1				*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1			
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					571,224,500	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				665,804,500	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah rapat koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan (Kali)	4		229,136,300	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan (Kali)	4		229,136,300	
			*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1				*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1			
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	120		342,088,200	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	120		436,668,200	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100		2,232,270,850	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100		2,052,451,750	

			Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA) (%)	100				Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA) (%)	100				
			Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)	100				Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)	100				
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					823,726,050	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					795,364,950	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	1		116,527,200	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	1		113,375,500	
			*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1					*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	1		53,123,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	1		35,123,000	
			*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Perangkat	1					*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	1			

			Daerah)						Pembangunan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	1		74,954,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	1		62,954,000	
			*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1					*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	2		170,274,600	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	2		196,515,200	
			*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	2					*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	2			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	1		48,281,250	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	1		51,781,250	

			*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1				*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	1		31,775,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	1		27,275,000	
			*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah)	1				*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah)	1			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	1		61,193,600	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	1		39,443,600	
			*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah)	1				*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah)	1			

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	2		267,597,400	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	2		268,897,400	
			*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2				*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					494,129,400	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				417,939,400	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1		129,942,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1		129,542,000	
			*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1				*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1		20,250,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1		11,250,000	

			*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	1				*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	1			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1		66,995,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1		33,295,000	
			*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	1				*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	1			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1		60,330,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1		60,330,000	
			*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1				*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	1		113,987,400	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	1		97,457,400	

			*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1				*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	1		20,250,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	1		11,250,000	
			*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	1				*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	1			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	1		57,295,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	1		46,945,000	
			*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	1				*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	1			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	1		25,080,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	1		27,870,000	

			*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1				*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					914,415,400	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					839,147,400
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)	1		55,698,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)	1		54,123,000
			*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1					*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)	1		9,023,100	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)	1		6,297,100
			*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	1					*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	1		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)	1		54,720,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	1		52,245,000

								(Dokumen)				
			*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	1				*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	1			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur. (Laporan)	1		431,394,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur. (Laporan)	1		432,323,000	
			*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1				*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)	1		146,153,300	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)	1		130,201,300	
			*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1				*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1			

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)	1			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)	1				
			*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)	1		19,200,000		*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)	1			2,250,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)	1			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)	1				
			*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)	1		44,894,000		*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)	1			34,094,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan. (Laporan)	1			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan. (Laporan)	1				
			*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1		153,333,000		*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1			127,614,000	

								(Laporan)				
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan daerah (%)	100		1,203,094,400	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan daerah (%)	100		1,304,614,800
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					546,020,600	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					355,525,000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Penelitian Bidang Pemerintahan Umum yang Disusun/Dikerjakan (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	1		49,999,800	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Penelitian Bidang Pemerintahan Umum yang Disusun/Dikerjakan (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	1		-
			*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	1					*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	1		
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Jumlah Penelitian Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Disusun/Dikerjakan (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	1		50,003,600	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Jumlah Penelitian Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Disusun/Dikerjakan (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	1		-

			*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	1				*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	1			
	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa		*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	1		237,917,600	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	1		-	
							Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				312,101,000	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan (Dokumen/Publikasi)	1		208,099,600	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan (Dokumen/Publikasi)	1		43,424,000	
			*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1				*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					259,589,600	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				302,489,600	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang Disusun. (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	1		259,589,600	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang Disusun. (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	1		302,489,600	

			*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1				*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					299,209,600	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					383,115,600
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup yang Disusun. (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	1		299,209,600	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup yang Disusun. (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	1		383,115,600
			*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1					*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi					98,274,600	Pengembangan Inovasi dan Teknologi					263,484,600
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Penelitian, pengembangan dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang Disusun/Dikerjakan. (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	1		98,274,600	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Penelitian, pengembangan dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang Disusun/Dikerjakan. (Penelitian/Dokumen/Publikasi)	1		263,484,600
			*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1					*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1		
					12,110,466,528						13,898,847,170	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2022 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu. Akan tetapi Bappedalitbang hanya mengkoordinir dan memfasilitasi usulan dari masyarakat melalui Musrenbang Desa, Kecamatan sampai Musrenbang tingkat Kabupaten dan menyampaikan kepada SKPD teknis serta permasalahan yang terjadi dilapangan untuk dimasukkan dalam Program dan Kegiatan SKPD terkait. Oleh karena itu, Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu pada Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan.

Tabel 2.4
Usulan Program Kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2022
Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.1.1. Analisis Kinerja Output

Kemajuan Kinerja Kegiatan secara fisik di Triwulan II Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang P2EPD : Sudah tersusun dokumen RKPD Tahun 2023 dan dokumen RKPD perubahan Tahun 2022. Sedangkan dokumen Penyusunan Profil Pembangunan Daerah masih dalam tahap penyusunan (Progress 45%)
- Bidang PPM : Pada anggaran Tahun 2022 target output dokumen ada 3, yakni konvergensi stunting yang sdh mencapai 5 aksi dari target 8 aksi (60%), dokumen KKS dan Kemiskinan yang masih dalam proses pengumpulan data
- Bidang EkoSDAInfraswil : Pada anggaran Tahun 2022 target output dokumen ada 2, yakni Dokumen RAD AMPL yang sudah sampai pada tahap perumusan strategi dan arah kebijakan (Progres 40%) dan Dokumen SSK sudah mencapai progress 90% (tinggal peta spasial)
- Bidang Litbang : Pada anggaran tahun 2022 target output pada bidang Litbang ada 4 dokumen yang masih dalam tahap penyusunan, yaitu :
 - a. Dokumen Penelitian PAD (Pendapatan Asli Daerah),
 - b. Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian di Tanah Bumbu
 - c. Dokumen Indikator Kesolehan Sosial di Tanah Bumbu
 - d. Dokumen Indikator Pembangunan Pemuda di Tanah Bumbu

kinerja keluaran (*output performance*) pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan mencapai 34,59%, artinya, sangat baik kinerja keuangan maupun kinerja program menunjukkan capaian yang sangat baik, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan Rencana Kerja (Renja) perubahan Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2020. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan.

2.1.2. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program. Pada tahun 2022 di Triwulan II, Bappedalitbang melaksanakan 4 program dan 16 kegiatan dengan capaian kinerja keuangan sebesar 34,59%

Adapun Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.730.750	-	0,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.557.839.409	2.930.225.493	52,72
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	869.763.350	435.313.475	50,05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.500.000	19.500.000	100,00
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.798.300	-	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.535.000	8.535.000	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	365.210.000	72.910.000	19,96
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.565.000	37.475.000	32,71
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.070.000	4.170.000	19,79
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.640.000	540.000	4,64
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	820.482.000	266.225.586	32,45
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.745.000	51.963.650	35,17
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.180.406	65.956.202	53,54
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Belanja Barang dan Jasa	147.400.000	46.129.250	31,30
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	76.694.000	95,87

16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	-	0,00
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau lainnya	50.595.000	27.875.000	55,09
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
18	Pelaksanaan Konsultasi Publik	239.933.250	67.692.250	28,21
19	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	273.743.500	175.280.800	64,03
20	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	50.991.150	50.991.150	100,00
21	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.208.107.350	497.504.040	41,18
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
22	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	152.801.250	23.130.000	15,14
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
23	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	272.352.800	62.412.600	22,92
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
24	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.256.150	18.832.750	31,25
25	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13.650.000	-	0,00
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.734.050	29.344.550	49,13
27	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13.658.700	-	0,00
28	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	52.050.000	750.000	1,44

29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	474.634.400	40.609.400	8,56
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89.819.200	28.204.200	31,40
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	13.950.000	3.375.000	24,19
32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	82.995.000	10.930.000	13,17
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	14.650.000	7.950.000	54,27
24	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66.207.650	25.742.650	38,88
25	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	13.950.000	3.375.000	24,19
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	29.395.000	4.930.000	16,77
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.697.020	18.424.520	36,34
38	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.773.100	-	0,00
39	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	64.194.200	4.200.000	6,54
40	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	506.135.000	112.079.405	22,14

41	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.382.400	31.648.300	41,98
42	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18.000.000	-	0,00
43	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	53.210.000	30.000.000	56,38
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
44	penelitian dan pengembangan kesehatan	300.000.000	-	0,00
	TOTAL	12.746.325.385	5.290.919.271	41,51

Tabel 2.2.2 Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Pada Triwulan II

Dari 4 program yang direncanakan dilaksanakan di tahun anggaran 2022 pada Triwulan II rata-rata penyerapan anggaran adalah 34,59%, artinya pelaksanaan program/kegiatan **cukup baik** dengan program di dalam anggaran (APBD).

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDALITBANG KABUPATEN TANAH BUMBU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 10 Fokus Pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5

2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang jalan tol baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s

- e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta local champion literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Penurunan emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
 - b. Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Tingkat kemiskinan 8,5-9%

- b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%
 - c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
 - b. Insidensi TB 231/100.000 penduduk
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
 - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
 - f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
 - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%

h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Kemudian pada tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJPD tahun 2006-2025 dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu **“Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis”**. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Sedangkan rumusan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah **“Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Untuk Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan”** dengan lima prioritas daerah, yaitu :

1. **Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Perbaikan Kualitas dan Akses Penyelenggaraan Pendidikan secara Luas;
 - b. Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan;
 - c. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - d. Peningkatan Upaya Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 - e. Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting;
 - f. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
 - g. Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Daya Saing Pemuda;
 - h. Peningkatan Sarana Dan Prasana Olahraga;
 - i. Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan;
 - j. Peningkatan Akses dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Perempuan;
 - k. Peningkatan Akses, Perlindungan, Pemberdayaan dan Pelayanan Bagi Kelompok Disabilitas, dan Lansia;
 - l. Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat.

2. **Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan;
 - b. Peningkatan Produktifitas Pangan;
 - c. Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi;
 - d. Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. Peningkatan Kunjungan Wisatawan;
 - f. Peningkatan Sarana dan Prasaran Tranportasi;
 - g. Percepatan Penurunan Kemiskinan;
 - h. Perlindungan PMKS;
 - i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial;
 - j. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.
3. **Pembangunan Infrastruktur yang terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Perkotaan;
 - b. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru;
 - c. Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas;
 - d. Penurunan Luasan Kawasan Kumuh;
 - e. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Aman;
 - f. Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi Layak;
 - g. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman;
 - h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir;
 - i. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana;
 - j. Pengembangan Fungsi Ruang Terbuka;
 - k. Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

4. **Pembangunan Masyarakat yang Agamis**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan;
 - b. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Perorangan/Kelompok;
 - c. Peningkatan Musyawarah Antar Umat Beragama;
 - d. Peningkatan Pembinaan Pasangan Usia Subur;
 - e. Pembangunan Rumah Tahfiz di setiap Desa.

5. **Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima;
 - b. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
 - c. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah;
 - d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah;
 - e. Peningkatan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - f. Peningkatkan Status dan Kemajuan Kemandirian Desa;
 - g. Peningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Dasar Bagi Pembangunan Daerah
 - h. Mendukung Percepatan Penyederhaan Birokrasi.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Makro yang ditetapkan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022, antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.72 - 0.78 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.02 - 5.88 %
3. Indeks Kesolehan Sosial 68.00 - 68.58
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71.91 - 72.15
5. Infrastruktur yang Mantap 52.06 - 56.98 %
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 4.29 - 4.19 %
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 76.15 - 76.83
8. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 60.69 - 60.91 (CC)
9. PDRB Sub Sektor Pertanian (ADHB) 1.64 - 2.50 %
10. PDRB Sub Sektor Perikanan (ADHB) 3.56 - 3.72 %
11. PDRB Sub Sektor Perkebunan (ADHB) 1.06 - 2.24 %
12. PDRB Sub Sektor Peternakan (ADHB) 1.90 - 2.26 %
13. PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) 0.36 - 5.84 %
14. Pertumbuhan Investasi 9.96 - 10.02 %

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah “Memantapkan Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Dengan Memperhatikan Lingkungan”, dengan prioritas daerah diarahkan pada :

Tema tersebut dapat diturunkan menjadi 4 fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata

4. Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Covid-19

Selanjutnya dari empat fokus pembangunan RKPD Kalimantan Selatan tahun 2022 maka dijabarkan kedalam 6 prioritas daerah, yaitu :

Prioritas 1

Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata :

1. Peningkatan Nilai Tambah hasil Industri dan Pertanian
2. Mendorong Pariwisata dan Pengembangan Geopark
3. Peningkatkan Jumlah dan Kelas Wirausaha baru
4. Peningkatan Realisasi Investasi yang berdampak ke Daerah

Prioritas 2

Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia :

1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
3. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
4. Pengendalian Prevalensi Stunting
5. Penurunan Angka Pernikahan Anak
6. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
7. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
8. Peningkatan Prestasi Olahraga

Prioritas 3

Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:

1. Pengembangan Kawasan Prioritas
2. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi
3. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar.

Prioritas 4

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :

1. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
2. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Peningkatan Pelayanan Publik
4. Pengembangan Satu Data Kalsel

Prioritas 5

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana :

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana
3. Mendorong Penggunaan Energi Baru Terbarukan

Prioritas 6

Kalsel Sebagai Gerbang Dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru:

1. Membuka Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN
2. Mengembangkan Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN.

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 	<ol style="list-style-type: none"> Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana Kalsel Sebagai Gerbang Dari Food Estate Dan Ibu Kota Negara Baru 	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan Pembangunan Masyarakat yang Agamis Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya BAPPEDALITBANG mendukung pencapaian prioritas ke 5, yaitu “Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional, pada focus Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah dan Peningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Dasar Bagi Pembangunan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu

Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, yaitu:

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas
2. Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Daerah yang mendukung Pembangunan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan hasil Litbang dan SiDa dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
4. Terwujudnya kinerja pelayanan Bappeda yang memuaskan yang didukung SDM profesional.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi 2021
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas. Sasaran : Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan	1. Persentase Tingkat Capaian Tujuan RPJMD	100	100	100	100	100	100	89,19%
	2. Nominator penghargaan PPD Tingkat Provinsi dan Nasional.	Peringkat 1-3 Provinsi, 10 besar nasional	Peringkat 1-3 Provinsi, 10 besar nasional	Peringkat 1-3 Provinsi, 10 besar nasional	Peringkat 1-3 Provinsi, 10 besar nasional	Peringkat 1-3 Provinsi, 6 besar nasional	Peringkat 1-3 Provinsi, 6 besar nasional	
	3. Dokumen PPD dapat diukur dan dievaluasi.	100					100	
	4. Penyusunan dokumen tepat waktu.	Tepat waktu					Tepat waktu	
Tujuan : Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Daerah yang mendukung Pembangunan Daerah. Sasaran : Mengoptimalkan hasil Litbang dan SiDa dalam perencanaan dan pembangunan daerah	Persentase penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan/di tindaklanjuti atau mendukung pembangunan daerah.	N/A	100	100	100	100	100	50%

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

- 1 Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 serta Renstra Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
- 2 Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Secara khusus, Sekretariat DPRD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang baik dan melayani” dan indikator sasaran “Nilai Indeks Reformasi Berokrasi SKPD”;
- 3 Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 4 Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- 5 Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

- 6 Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 adalah sebanyak 4 (empat) program, yang terdiri dari :
 - a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota,
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
 - c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
 - d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 adalah sebanyak 16 (enam belas) kegiatan, dan 62 (enam puluh dua) sub Kegiatan
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebesar Rp 13.898.847.170,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan perincian :
 - a. Rp. 8.652.510.820,- untuk Program Penunjang urusan pemerintahan daerah (kabupaten/kota).

- b. Rp. 1.889.269.800,- untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Rp. 2.052.451.750,- untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Rp. 1.304.614.800,- untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana kerja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 disertai indikator program, kegiatan dan sub kegiatan serta sumber pendanaan bisa di lihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01				PERENCANAAN								
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)		82	8,652,510,820			100	9,490,973,465
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)		100	6,962,460,952			100	7,327,602,759
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)		12	6,047,417,652				
						*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		1053				1053	6,057,839,409
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Bulan)		12	915,043,300				
						*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		1				1	1,269,763,350
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)		100	19,800,000			100	64,298,300

5	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia (stell)	65	19,800,000				
						*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65				65	19,500,000
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	30	-				
						*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30				15	44,798,300
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	929,629,200			100	1,279,652,000
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (buah)	50	4,866,200				
						*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50				50	8,535,000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	20	74,645,000				
						*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20				20	200,000,000
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (bulan)	12	90,170,000				
						*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12				20	124,565,000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	12	19,180,000				

						*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		12				12	21,070,000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Media/Buku/Eksemplar)		24	1,800,000				
						*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		24				10	5,000,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)		12	738,968,000				
						*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1				1	920,482,000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)		100	-				
5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun*) (unit)		1	-				
						*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1					
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100	316,180,668			100	351,425,406
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa Surat Menyurat (bulan)						12	500,000

5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (bulan)	12	148,345,000				
						*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1				1	167,745,000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	167,835,668			12	183,180,406
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	424,440,000			100	467,995,000
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	25	169,445,000				
						*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25				25	167,400,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	1	184,950,000				
						*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1				1	200,000,000
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	12	-				
						*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	12				1	30,000,000

						Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)							
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	25	70,045,000					
						*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25				30	70,595,000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu (%)	100	1,889,269,800			100	3,115,000,000	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	1	923,824,150			1	1,430,000,000	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)	1	99,997,900					
						*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1						
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi publik (Dokumen)	1	60,889,750					
						*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1				1	239,933,250	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD (Dokumen)	1	-					

						*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)		1					
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	umlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun (Dokumen)		1	82,498,700				
						*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)		1			1	273,743,500	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun (Dokumen)		12	18,029,250				
						*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)		12			1	50,991,150	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah (Dokumen)		1	662,408,550				
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)		1			1	865,332,100	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen/Buku hasil analisis data dan informasi PPD (Dokumen/Buku)		1	299,641,150			1	385,000,000
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)		1	175,107,950				

						*Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Masukan)		1				1	180,000,000
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen laporan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD (Dokumen)		1	21,490,000				
						*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)		1				1	205,000,000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Publikasi Profil Pembangunan Daerah (Dokumen/Publikasi)		1	103,043,200				
						*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)		1					
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)		100	665,804,500			100	1,300,000,000
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan (Kali)		4	229,136,300				
						*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		1				1	500,000,000
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen laporan pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah (Dokumen)						1	300,000,000

5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)		120	436,668,200			120	500,000,000
5	01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)		100	2,052,451,750			100	3,667,914,715
						Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA) (%)		100				100	
						Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)		100				100	
5	01	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)		100	795,364,950			100	1,385,079,655
5	01	3	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)		1	113,375,500				
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		1				1	125,706,150
5	01	3	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)		1	35,123,000				

						*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)		1			1	148,254,250
5	01	3	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)		1	62,954,000			
						*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		1			1	51,850,000
5	01	3	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)		2	196,515,200			
						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)		2			2	231,027,400
5	01	3	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)		1	51,781,250			

						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		1				1	145,399,050
5	01	3	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)		1	27,275,000				
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah)		1				1	228,444,405
5	01	3	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)		1	39,443,600				
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah)		1				1	145,050,000
5	01	3	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)		2	268,897,400				

						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2			2	309,348,400
5	01	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA) (%)	100	417,939,400		100	855,000,000
5	01	3	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1	129,542,000			
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1			1	150,000,000
5	01	3	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1	11,250,000			
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	1			1	65,000,000
5	01	3	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1	33,295,000			

						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)		1				1	180,000,000
5	01	3	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)		1		60,330,000			
						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		1				1	75,000,000
5	01	3	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)		1					
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		1		97,457,400			125,000,000
5	01	3	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)		1					
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)		1		11,250,000			75,000,000
5	01	3	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)		1		46,945,000			

						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)		1			1	150,000,000	
5	01	3	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonitasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)		1	27,870,000				
						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)		1				1	35,000,000
5	01	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)		100	839,147,400			100	1,427,835,060
5	01	3	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)		1	54,123,000				
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		1				1	152,091,060
5	01	3	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)		1	6,297,100				

						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)		1			1	59,318,300
5	01	3	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)		1	52,245,000			
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)		1			1	77,675,000
5	01	3	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur. (Laporan)		1	432,323,000			
						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)		1			2	600,000,000
5	01	3	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)		1	130,201,300			
						*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		1			1	226,147,200

5	01	3	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)		1				
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)		1	2,250,000		1	21,780,000
5	01	3	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (Dokumen)		1				
						*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)		1	34,094,000		1	70,823,500
5	01	3	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan. (Laporan)		1				
						*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)		1	127,614,000		1	220,000,000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							

5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan daerah (%)		100	1,304,614,800			100	1,630,000,000
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Disusun (Dokumen)		1	355,525,000			1	630,000,000
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian Bidang Pemerintahan Umum yang Disusun/Dikerjakan (Penelitian/Dokumen/Publikasi)		1	-				
						*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)		1					
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Penelitian Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Disusun/Dikerjakan (Penelitian/Dokumen/Publikasi)		1	-				
						*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)		1					

5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Penelitian Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Penelitian/Dokumen/Publikasi)		1	312,101,000			1	600,000,000
5	05	02	2.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)		1	-				
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan (Dokumen/Publikasi)		1	43,424,000				
						*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)		1				1	30,000,000
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Disusun (Dokumen)		1	302,489,600			1	600,000,000
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang Disusun. (Penelitian/Dokumen/Publikasi)		1	302,489,600				
						*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)		1				1	600,000,000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Disusun (Dokumen)			383,115,600				
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup yang Disusun.		1	383,115,600				

						(Penelitian/Dokumen/Publikasi)								
						*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)		1						
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi Daerah dan Teknologi yang Dikembangkan. (Inovasi)		1	263,484,600			1		400,000,000
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, pengembangan dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang Disusun/Dikerjakan. (Penelitian/Dokumen/Publikasi)		1	263,484,600					
						*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		1				1		400,000,000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bappedalitbang, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum SKPD di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program dan sektor.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 :

1. Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA tahun 2021 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi,, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD).
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
3. Perubahan Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam P-KUA dan P-PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen perubahan renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan
2. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud

4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan disusunnya Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2022.

Batulicin, Juli 2022
Kepala Bappeda,

Andi Anwar Sadat, S.Pi
Pembina
NIP. 19711128 200604 1 018

